

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pariwisata terjadi karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru (Robinson, 1976 dalam Murphy, 1985). Sebenarnya pariwisata sudah ada sejak beradaban manusia dengan adanya gerakan yang dilakukan manusia berupa ziarah ataupun perjalanan agama. Saat ini pariwisata sudah menjadi hal yang diperhatikan pemerintah karena pariwisata bisa menaikkan devisa negara, pariwisata juga cukup menjanjikan untuk mensejahterakan rakyatnya di setiap negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km², luas laut 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia, (Suharto, 2009). Berdasarkan data tersebut maka Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara, karena Indonesia adalah negara yang terkenal akan sumber daya alamnya, Indonesia juga disebut negara kepulauan oleh sebab itu Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat yang bagus untuk dijadikan objek wisata, contohnya wisata laut, wisata alam dan masih banyak lagi tempat yang bisa dijadikan objek wisata.

Provinsi Jawa tengah yang terdiri dari beberapa wilayah maupun daerah yang memiliki keunggulan keunggulan yang menarik serta unik dalam bidang pariwisata. (Fauzan, 2013). Bidang pariwisata tersebut anantara lain wisata alam seperti pantai, air terjun, hutan, hutan, dan kepulauan. Dan masih banyak lagi seperti wisata budaya, wisata kuliner dan lain-lain.

Kabupaten jepara memiliki banyak sekali potensi yang sudah berkembang maupun yang baru dikembangkan. Jepara juga memiliki program - program pengembangan objek wisata alam dan budaya, (Anung Wicaksono, 2015). Maka dinas pariwisata kabupaten jepara memiliki peran untuk mendorong atau membina masyarakatnya agar masyarakat mau ikut serta dalam mengembangkan potensi alam yang melimpah tersebut. Pada dasarnya wisata alam dikelola atau dibangun oleh masyarakat pedesaan terpencil.

Pemerintah Desa adalah basis Pemerintahan terendah maka biasanya wilayah Pemerintah Desa menjadi sasaran aktifitas penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah, dalam struktur pemerintahan Indonesia yang penentuan berhasilnya pembangunan nasional yang merata, (Ahkam, 2018). Aspek yang perlu dibangun dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah mengelola sumber daya alam yang ada untuk menjadikan sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui penerimaan devisa, (Takariadinda Diana Ethika, 2016). Dalam hal ini hakikatnya pariwisata bisa mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisatawan yang akan datang ke Desa melalui pariwisata yang didukung oleh dinas pariwisata dan dikelola oleh masyarakat supaya masyarakat juga dapat peningkatan penghasilannya. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan tingkat ketertiban masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup, (Cifor, 2004).

Menurut Putra, S, H. (2017). Mengatakan bahwa tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang good governance. Desa Wisata merupakan cara supaya masyarakat dapat meningkatkan daya dan memperhatikan lingkungan hidup yang dimiliki masyarakat Desa, Peran Pemerintah Desa dibutuhkan agar bisa mengawasi dan meningkatkan daya masyarakat supaya mereka bisa lebih baik kedepannya.

Menurut gambaran di atas tata kelola yang baik dilihat dari sistem pemerintahan yang bagus dan Partisipasi masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena yang mengelola Desa Wisata Plajan adalah masyarakat Desa didukung oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sesuai

dengan Perbup Nomor 55/179 Tahun 2018 tentang penetapan Desa unggulan, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilan Desa Wisata tersebut. serta memiliki motivasi yang lebih untuk menjadikan Desa Wisata Plajan menjadi Desa Wisata yang maju.

Tata Kelola Pemerintah Desa diharapkan mampu dalam pemberdayaan masyarakat lewat wisata dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman, meningkatkan wawasan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Plajan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Masalah yang sangat dasar yaitu mindset masyarakat Desa Plajan yang tidak semuanya sadar bahwa potensi pariwisata yang ada di daerah mereka. Sehingga hanya beberapa dari masyarakat yang bergerak mengelola pariwisata tersebut.

Tata Kelola Pemerintah Desa sangatlah perlu agar wisata yang dimiliki Desa Plajan bisa berkembang dan maju. bermasyarakat adalah menciptakan suasana yang rukun terkhusus di Desa Plajan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan Desa Wisata Alam, dengan adanya tempat - tempat wisata yang sudah dijelaskan di atas seharusnya masyarakat Desa bisa mengelola dengan baik dan menarik wisatawan yang lebih banyak lagi.

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk penerepan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, (Inskeep, 1991). konsep

pengembangan Desa Wisata adalah suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan Desa Wisata, (pearce, 1995).

Desa Plajan memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bagus untuk dikembangkan dan yang saat ini sudah dimiliki adalah pura dharma loka, kedung gong, cagar budaya bale rama, cagar budaya keramat, belik sumur, sendang, wisata air tirat, sumur batu tempuran, wisata religi johan, out bond tradisional. Meski memiliki potensi yang begitu banyak namun semua itu belum dikelola secara profesional oleh masyarakat Desa Plajan sebab kesadaran dari masyarakat masih sangatlah minim, kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alamnya juga belum baik. Itu disebabkan karena sumber daya manusianya masih banyak yang kurang dalam segi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan. maka penulis tertarik untuk meneliti Desa Wisata yang ada di Desa Plajan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju Di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun 2018” ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Sudah Dilakukan Dan Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju di Desa Plajan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada akademik maupun jurusan pengembang masyarakat dan ilmu pengetahuan umum, dan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju.

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang perlu kita kembangkan bersama dan memahami potensi – potensi yang ada di Desa tersebut terkhusus di bidang wisata alam berbasis masyarakat. Oleh sebab itu peneliti memaparkan mengenai Tata Kelola

Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Peneliti juga menggali informasi dari jurnal ilmiah, skripsi, tesis dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, H. Wibowo, A, S. Suryanto, R. Dofyani, H. dengan judul “praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan Desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari Desa percontohan”. Jurnal akutansi terapan indonesia Vol,1 No.1 maret 2018.

Hasil penelitian ini adalah penting bagi Pemdes untuk merubah pola pikir masyarakat Desa sebelum pembangunan Desa dijalankan. Hal ini bertujuan agar pembangunan Desa tidak dijalankan berdasarkan keterpaksaan karena menerima dana Desa, akan tetapi berdasarkan kesadaran untuk menjadikan Desa menjadi mandiri.

Selain itu, penting bagi Desa untuk mendelgasikan pegawainya untuk menempuh studi lanjut, juga senantiasa membangun sinergi kepada level pemerintah yang lebih tinggi di atasnya (Pemkab dan Pemprov),

lembaga universitas dan antar Desa itu sendiri dalam upaya berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menopang Pemdes untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan dan praktik tata kelola desa. Terakhir, dalam rangka peningkatan kinerja Desa, maka kearifan lokal rakyat Indonesia, yakni budaya gotong royong harus senantiasa digalakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto, A. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2015. dengan judul penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus.

Hambatan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa.

Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, S, H. dengan judul Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal politik muda Vol.6 No.2 Tahun 2017.

Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Kalibelo harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek, misalnya di aspek transparansi Pemerintah Desa Kalibelo seharusnya memberi rincian jelas terhadap penggunaan dana Desa serta membuat poster yang di tempeltempel kan di tempat umum agar pemerintahanya lebih transparan dan aspek akuntabilitas semua perangkat Desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang di capai dapat maksimal, sehingga menjadi Pemerintahan yang good governance. Untuk aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaran, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan visi strategis Pemerintah Desa Kalibelo sudah cukup bagus.

Pemerintah Desa Kalibelo harus memiliki prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus dalam tata kelola pemerintahannya.

Upaya Pemerintah Desa Kalibelo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, mengrekrut dua orang anak muda yang berguna membantu Desa dalam melakukan atau

menjalankan tugas dengan kriteria tertentu, Pemerintah Desa Kalibelo juga berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat Desa Kalibelo, Pemerintahan Desa memberikan rangsangan –rasangan agar rasa partisipasi masyarakat Desa Kalibelo bisa tumbuh dengan cara memberi hadiah atau kue di waktu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa, di hadapan dengan hal itu masyarakat sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Desa guna kesejahteraan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoman Sukma Arida, Kerti Pujani dengan judul kajian penyusunan kriteria-kriteria Desa Wisata sebagai instrument dasar pengembangan Desa Wisata. Jurnal analisis pariwisata vol.17 no.1 2017 issn: 1410-3729.

Hasil penelitian ini sesungguhnya telah melalui proses ‘hilirisasi hasil riset’ karena telah dipergunakan oleh tiga kantor Dinas Pariwisata Kabupaten di Bali sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pariwisata, yakni: kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem, melalui kegiatan Kajian Potensi Desa Wisata. Khusus untuk Kabupaten Gianyar bahkan sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Sedangkan di kabupaten Badung hasil kajian kriteria Desa Wisata sedang berproses menjadi produk hukum berbentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar, Widy Kurniati Mohi dengan judul peran Pemerintah Desa dalam menunjang

pendapatan masyarakat petani jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jurnal ilmu pemerintahan vol.3 no,2 2017 issn 2442-5958.

Hasil penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan dengan baik tetapi aspek lain belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Peran Pemerintah Desa Dulohupa yang telah dilaksanakan yakni: Mendatangkan penyuluh pertanian dengan melakukan sosialisasi tata cara penanaman jagung, tetapi masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan di antaranya perlu rentang waktu pelaksanaan sosialisasi dan bentuk sosialisasi dalam bentuk kebun percontohan yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Desa.

Peran Pemerintah dalam penyediaan bibit jagung, pupuk dan pestisida belum dilaksanakan. Pemerintah Desa belum mengupayakan penyediaan bibit, pupuk maupun pestisida sehingga sebagian besar masyarakat petani jagung harus membeli bibit, pupuk maupun pestisida harus ke Kota Gorontalo. Peran Pemerintah dalam Membantu Pemasaran.

Hasil Panen juga belum dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum dapat mengupayakan agar petani tidak sembarang menjual hasil panennya.

Peran pemerinrah Desa Dulohupa kecamatan Boliyohuto dalam membantu pemasaran hasil panen jagung belum tampak. Pemerintah

berdalih bahwa peran tersebut memerlukan dukungan dana yang cukup besar karena Pemerintah harus menampung hasil panen jagung petani. Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung di antaranya dukungan dan kepedulian Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, penyediaan bibit pupuk dan pestisida maupun dukungan pemasaran hasil panen jagung. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, tidak ada dukungan pihak ketiga dalam menyediakan sarana dan prasarana penyediaan alat dan bahan pertanian, serta kebiasaan masyarakat menjual hasil panen pada tengkulak.

Penelitian yang dilakukan oleh Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, Dan M. Baliquni dengan judul pengembangan Desa Wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Jurnal kawistara vol.3 no.2 Agustus tahun 2013 hal.117-226.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifa Fitrianti dengan judul strategi pengembangan Desa Wisata talun melalui model pemberdayaan masyarakat. Jurnal economics development analysis journal vol.3 no. 1 tahun 2014 issn 2252-6765.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat yang dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Talun adalah masyarakat yang memiliki tambak dan warung makan. Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha pada lokasi objek wisata.

Selanjutnya, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dengan memberikan pelatihan – pelatihan dari dinas untuk mengolah ikan menjadikan masyarakat yang mulanya tidak memiliki daya menjadi lebih berdaya dengan adanya kegiatan untuk menciptakan nilai tambah pada ikan. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Dalam hal ini, peran pemerintah untuk melindungi adanya investor yang masuk, karena dikhawatirkan investor akan mengancam keberadaan masyarakat lokal yang mendirikan usaha di Desa Wisata Talun. Kekuatan utama dari Desa Wisata Talun adalah sebagian promosi dilakukan lewat

internet oleh individu. Untuk kelemahan atau kekurangan utama adalah ketidaklibatan masyarakat yang tidak memiliki tambak.

Peluang utama yang dimiliki untuk mengembangkan Desa Wisata Talun adalah pelatihan dari dinas untuk mengolah ikan dan pemberian alat dari dinas untuk mengolah ikan. Selain itu ada ancaman utama yang mungkin akan menghambat dalam pengembangan Desa Wisata adalah investor yang ditakutkan akan masuk.

Alternatif strategi yang ditawarkan melalui analisis yang dilakukan menggunakan alat analisis SWOT digunakan untuk pengembangan Desa Wisata Talun.

Penelitian yang dilakukan oleh Hemas Prabawati Jakti Dan Aswani Manaf dengan judul faktor-faktor keberhasilan pengembangan desa wisata di dataran tinggi dieng. Jurnal teknik PWK vol.2 no. 3 2013 hal. 559-568.

Hasil penelitian ini adalah Pelaku utama didalam kegiatan pariwisata terutama wisata budaya dan adat istiadat ini adalah masyarakat pelaku wisata. Dana PNPM Mandiri Pariwisata diberikan untuk memfasilitasi masyarakat pelaku wisata atau embrio aktivitas masyarakat yang menjadi daya tarik wisata.

Sehingga masyarakat pelaku wisata ini secara mandiri, merencanakan, mengalokasikan dan mengelola dana yang mereka dapat dan menggunakannya sebagai alat untuk mensupport dalam pekerjaan menjadi pelaku wisata. Pemerataan pemanfaatan Dana PNPM Mandiri Pariwisata di Desa ini cukup terbilang merata dan menyentuh langsung

masyarakat pelaku wisata dan pokdarwis sebagai komunitas yang membina saja.

Selain itu realisasi dana PNPM Mandiri Pariwisata ini juga sangat bagus, karena realisasi berdasarkan embrio (kegiatan masyarakat yang sudah berjalan dan menjadi daya tarik wisata). Sehingga menyebabkan Desa ini menjadi lebih layak jual, kreatif dan menjadi destinasi wisatawan seperti saat ini Faktor – faktor keberhasilan dari community based-tourism dalam pengembangan Desa Wisata adalah :

1. Keunikan lokasi merupakan daya tarik utama yang menyebabkan terjadinya aktivitas pariwisata. Keunikan lokasi ini dapat berupa daya tarik fisik alam, sejarah dan budaya.

2. Pelibatan masyarakat sebagai pelaku wisata utama.

3. Fasilitasi Dana Berdasarkan Embrio Pelaku wisata.

Embrio yang dimaksud adalah pengembangan dan fasilitasi dana PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan aktivitas yang berkembang di Desa Wisata tersebut.

4. Tokoh Penggerak merupakan orang – orang yang memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat luas untuk ikut terlibat didalam usaha kepariwisataan.

Tokoh penggerak ini harus dapat memimpin (leadership) 5. Link merupakan hubungan kemitraan yang terjalin dengan stakeholder penting yang memiliki andil dalam pengembangan Desa Wisata. Seperti contohnya adalah pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Balyan Saeful Ahkam dengan judul peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sunan gunung djati bandung 2018.

Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa jayamukti melalui program Desa Wisata yaitu pelatihan secara individu dan kelompok, pelatihan individu meliputi pemahaman tentang Desa Wisata, sedangkan pelatihan secara kelompok berupa pengelolaan sumber daya alam dari tahap awal sampai proses publikasi dimedia. proses pelaksanaan kegiatan program Desa Wisata terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap prapelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan hasil pemberdayaannya yaitu antara lain imbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada.

Meningkatnya penghasilan masyarakat dari sektor pariwisata, secara umum maka dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Wisata bisa dikatan berhasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016. Hasil penelitian ini ada dua bagian yaitu:

1. Penerapan UU No. 6 Tahun 2014

- a. Pengawasan: suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di Desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng.
- b. Daya tanggap: tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa Sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang pada penerapan UU No.6 Tahun 2014.
- c. Transparansi: ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di Desa Majannang dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.
- d. Partisipasi: Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya.

2. Faktor-faktor terbitnya UU No. 6 Tahun 2014

- a. Pengawasan: pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Desa hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa majannang program-program tidak dijalankan secara merata. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan keuangan. Bentuk pengawasan dalam bentuk tertulis yang dimaksud adalah pengawasan pada anggaran pemerintah saja khususnya untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana.
- b. Daya tanggap: Proses penyelenggaraan pemerintah Desa tidak terlepas dari prinsip good governance yaitu prinsip daya tanggap. pemerintah Desa tidak terlepas dari prinsip good governance yaitu prinsip daya tanggap. Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Di Desa m keterlibatan masyarakat sangat kurang , ini

dibuktikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dilaksanakan secara internal (kantor) tanpa melibatkan unsur –unsur yang terkaitajannag faktor-faktor terbitnyaUU No. 6 Tahun 2014 adanya.

- c. **Transparansi:** Pada prinsip ketiga ini dalam good governance yaitu transparansi yang diartikan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Transparansi yang terjadi di Desa majannag faktor-faktor terbitnyaUU No.6 Tahun 2014 bisa dikatakan tertutup sebab Informasi program pemerintah terkadang sudah berjalan barulah masyarakat mengetahuinya.
- d. **Partisipasi:** Optimalnya suatu pelayanan dilakukan dengan kinerja dan produktivitas organisasi maupun lembaga maupun partisipasi masyarakat yang sangat efektif dan efisien.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Tata Kelola Pemerintah Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 3 dan Pasal 90 Huruf c adalah pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Putra (2017). Kesuksesan otonomi daerah berkaitan dengan tata kelola yang baik dan benar, didalam tata kelola yang baik ada sistem pemerintahan yang good governance.

Jdanli, S. Dalam Sutiono (2004) mengatakan bahwa Tata Kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. memberi contoh bahwa UNDP (United Nations Development Program)

mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesan tata kelola yang baik yaitu:

- a. mengikutsertakan semua;
- b. transparan dan bertanggung jawab;
- c. efektif dan adil;
- d. menjamin supremasi hukum;
- e. menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
- f. memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.

Heriyanto, S. Mengatakan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 6 yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- 2) Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat Desa;
 - b) Pelaksana Kewilayahan;
 - c) Pelaksana Teknis.

Penyelenggara pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, (Widjaja, 2003:3, dalam Hendra Mondong, 2013).

Dalam hal ini peran pemerintah Desa sangatlah penting bagi masyarakat karena hanya pemerintah Desa atau perangkat Desa yang mempunyai wewenang dalam membantu masyarakat Desa untuk membangun potensi alam yang ada di Desa, itu lah gunanya peran pemerintah Desa apalagi untuk Desa wisata yang sudah jelas membutuhkan peran pemerintah Desa supaya masyarakat bisa menggali potensi yang ada di Desa tersebut.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, (Ngomgano dan Tinggogoy, 2018).

Menurut Ngongano dan Tinggogoy, 2018 dilihat dari segi fungsi maka pemerintah Desa memiliki fungsi yaitu:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa
- b. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. melaksanakan pembinaan perekonomian Desa
- d. melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

- f. melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

2. Desa Wisata

Menurut Muchamad Zaenuri dalam bukunya mengatakan Undang Undang No. 9 Tahun 2010 tentang pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Innskeep, 1991 mengemukakan bahwa Desa Wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, biasanya di Desa-Desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Pengertian di atas merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisata dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Yang menjadi daya Tarik utama dari sebuah Desa Wisata adalah kehidupan warga Desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Kriteria yang digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu Desa adalah sebagai berikut:

- a. Atraksi Wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.

- b. Jarak tempuh adalah jarak dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak dari ibu kota provinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten.
- c. Besaran Desa, menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah Desa.
- e. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telfon dan sebagainya.

Untuk menentukan kriteria tersebut maka sudah tentu merujuk pada beberapa komponen dalam Desa Wisata.

Menurut Putra (2006) dalam bukunya hadiwijoyo S, S, ada lima komponen Desa Wisata :

- a. Memiliki potensi pariwisata, seni, budaya khas daerah setempat.
- b. Lokasi Desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.
- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni, dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Prinsip pengembangan Desa Wisata adalah salah satu produk alternative yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,
- b. Menguntungkan masyarakat setempat,
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat,
- d. Melibatkan masyarakat setempat,
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Kriteria yang mendasari prinsip pengelolaan Desa Wisata yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya Desa Wisata.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Desa Wisata sebagai suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari ke khasan Desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dsb.) sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis, yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya. (Ika Putra, 2007 dalam Ratna Sari, 2010: 27).

Menurut Soemarno, 2010 Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tat acara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti dan Wiendu. 1993).

Menurut Edward inskeep, wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di Desa- Desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Menurut Argyo Dermantoto, 2009 Terdapat dua konsep utama dalam komponen Desa Wisata :

- a. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit – unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi Desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, Bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984 Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

Menurut Talizihudu, 1981 Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Menurut Nurcholis, 2011 “Desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa adalah pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Maryani Dan Waluya, 2008 Desa mempunyai 3 kriteria sebagai berikut :

- a. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya, Desa terbelakang adalah Desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya Desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- b. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa, Desa sedang berkembang adalah Desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana Desa yang biasanya terletak di daerah peralihan Desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- c. Desa Maju atau Desa Swasembada, Desa maju adalah Desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik Desa secara maksimal. Kehidupan Desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan

mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Desa maju atau disebut Desa prasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan,

Desa maju atau Desa swasembada adalah Desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal, (Maryani dan Waluya, 2008). Untuk mengetahui Desa Maju Atau Desa Swasembada ada indikator - indikator sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Keadaan alam
- c. Orbitasi
- d. Mata pencarian
- e. Produksi
- f. Pendidikan
- g. Saran prasarana
- h. Adat istiadat
- i. Kelembagaan
- j. Swadaya dan Gotong royong

Menurut (Karyono, 1997) dalam mengembangkan Desa wisata ada beberapa komponen – komponen sebagai berikut :

- a. Atraksi dan kegiatan wisata, atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain lain yang merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas daerah tersebut yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan atau apa motivasi wisatawan yaitu keberadaan mereka disana dalam waktu setengah hari sampai berminggu – minggu.
- b. Akomodasi, akomodasi pada Desa Wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit – unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan Desa Wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal.
- d. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan Desa Wisata harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi.
- e. Infrastruktur lainnya, infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan Desa Wisata seperti sitem drainase.

- f. Transportasi, transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu.
- g. Sumber daya lingkungan alam dan sosial budaya.
- h. Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar perannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keramah tamahan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah - masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Buat mempermudah peneliti dalam menafsirkan banyak teori di dalam penelitian, maka ketentuan definisi konseptual terkait yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan Desa adalah sistem pemerintahan good governance supaya potensi atau sumber daya alam yang ada di Desa dapat di kelola dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memperbaiki kualitas hidup.

2. Desa Wisata

Desa wisata yaitu Desa yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dalam menikmati, mengenal, menghayati, dan mempelajari ke khasan

Desa dengan segala daya tariknya. Desa adalah dimana sekelompok masyarakat yang bermukim atau tinggal dan mengatur pemerintah nya sendiri atau kesatuan masyarakat hukum berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

H. Definisi Operasional

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa

- a. mengikutsertakan semua;
- b. transparan dan bertanggung jawab;
- c. efektif dan adil;
- d. menjamin supremasi hukum;
- e. menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
- f. memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.

2. Desa Wisata

- a. Memiliki potensi pariwisata, seni, budaya khas daerah setempat.
- b. Lokasi desa masuk dalam rute perjalanan paket wisata.
- c. adanya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni, dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung program Desa wisata.
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

I. Metode Penelitian

3. Jenis Penelitian

Pengertian metode penelitian (research method) adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian, (Haryono, 2012). Menurut Moleong yang dikutip dalam Dikha Andrean (halaman 21, 2018) Mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dalam bentuk kata – kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Arikunto seperti dikutip oleh Artike (2012:43) mengatakan bahwa buat menjawab dan mencari jalan keluar permasalahan makan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *kualitatif dengan pendekatan eksploratif*. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab – sebab atau hal – hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian. Peneliti mengatakan bahwa penelitian eksploratif ini secara kualitatif, (Artike, 2012:44).

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasinya berdasarkan dari jenis dan sumber sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak – pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan pengertian diatas khususnya pemerintah Desa mendapatkan informasi – informasi yang di perlukan, data primer di dalam penelitian ini didapatkan hasil wawancara langsung kepada informan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa
- 2) Ketua Pengelola Desa Wisata
- 3) Pegawai Desa satu orang
- 4) Masyarakat Desa tujuh orang

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan data yang telah tersedia bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, undang – undang yang berkaitan dan lain – lain yang dianggap perlu.

5. Unit Analisa

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis yang menjadi pokok penelitian adalah

Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan maka tentunya diperlukan data-data yang relevan dengan fokus penelitian untuk dianalisa dan memperoleh gambaran umum sebagai hasil penelitian. Data yang diperoleh harus sesuai dengan latar belakang permasalahan yang ada, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian.

Table 1.1

Daftar Nara Sumber Penelitian

No	Nara Sumber	Jumlah
1	Kepala Desa/Lurah	1
2	Ketua Pengelola Desa Wisata	1
3	Perangkat Desa	1
4	Masyarakat	7
	Total	10

b. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang diperoleh dari Pemerintah Desa.

7. Teknik Analisa Data

Menurut (Astohar, 2010) teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006: 20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim (2006: 22-23) dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.